

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang mengembangkan keuangan mikro secara komersial di Asia. Indonesia mengatur lembaga keuangan dengan menyediakan jasa pelayanan keuangan mikro di seluruh wilayah kepulauan. Selain keberhasilan pada penyediaan keuangan mikro secara komersial Indonesia juga merupakan tempat yang diminati untuk pengembangan program-program pemerintah bersubsidi, lembaga-lembaga keuangan lokal dan berbasis komunitas, koperasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Namun pada kenyataannya keuangan mikro di Indonesia masih menghadapi beberapa masalah krusial yang perlu mendapat perbaikan. Masih terbatasnya peran lembaga keuangan mikro juga dikarenakan belum tersedianya regulasi formal, terutama untuk keuangan mikro non-bank.

Keuangan mikro dalam bahasa Inggris disebut sebagai *microfinance*, yang berasal dari kata "*micro enterprise*" yaitu usaha mikro, dan "*finance*" yang berarti pembiayaan. Dari kedua istilah tersebut, dapat diartikan bahwa *microfinance* berarti pembiayaan untuk usaha mikro. Usaha mikro sendiri adalah suatu bisnis yang dijalankan dengan skala kecil, dimana *volume* usaha (omset) tidak melebihi Rp 100 juta per tahun dan modal kerja yang dimiliki tidak lebih dari Rp 25 juta.

Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau *Micro Finance Institution* adalah lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang

tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan formal yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis.

Lembaga perkreditan mikro di Indonesia pada dasarnya ada dua kelompok besar yakni **pertama**, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi sampai ke pelosok tanah air dan kelompok yang **kedua**, adalah koperasi, baik koperasi simpan pinjam yang khusus melayani jasa keuangan maupun unit usaha simpan pinjam dalam berbagai macam koperasi. Disamping itu terdapat LKM lain yang diperkenalkan oleh berbagai lembaga baik pemerintah seperti Lembaga Kredit Desa dan Badan Kredit Kecamatan yang dibiayai dari kredit likuiditas Bank Indonesia dan lain-lain, maupun swasta/lembaga non pemerintah seperti yayasan, LSM, dan LKM lainnya termasuk lembaga keagamaan.

Dari sekian banyak lembaga, lembaga keuangan mikro yang cukup mendapatkan banyak perhatian yaitu perbankan. Perusahaan perbankan merupakan bisnis yang bergantung pada kepercayaan. Ketidakpercayaan masyarakat dan investor kepada bank disebabkan adanya kekhawatiran bahwa uang yang mereka investasikan akan disalahgunakan oleh bank, uangnya tidak akan dikelola dengan baik, bank akan bangkrut dan dilikuidasi, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut tidak dapat ditarik kembali dari bank.

Salah satu lembaga keuangan *microfinance* di Indonesia yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana telah diatur oleh UU Perbankan, BPR mempunyai peran yang cukup strategis dalam perekonomian Indonesia terutama dalam mendorong perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Usaha mikro kecil menengah berperan sebagai pencipta lapangan usaha dan

pemerataan lapangan kerja. Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.

Jumlah BPR di wilayah Jawa Barat saat ini mencapai 520 perusahaan yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota diantaranya terdapat 6 perusahaan BPR yang berada di daerah Banjar, Ciamis, dan Pangandaran.

Seiring dengan semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan, maka tingkat kesenjangan sosial dan kerusakan lingkunganpun semakin tinggi karena adanya aktivitas perusahaan yang tidak terkendali terhadap berbagai sumber daya untuk meningkatkan laba perusahaan. Contoh aktivitas yang merugikan masyarakat misalnya banjir lumpur panas atau yang lebih di kenal sebagai bencana lumpur lapindo yang terjadi di Jawa Timur. Bencana lumpur lapindo adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran lapindobrantas. Hal tersebut bukan hanya merugikan masyarakat sekitar lokasi, namun juga bagi aktifitas perekonomian di Jawa Timur. Maka dari itu betapa pentingnya peranan *Corporate Social Responsibility* dalam sebuah perusahaan agar meminimalisir dampak negatif pada masyarakat. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang sesuai dengan isi Pasal 74 Undang-Undang Perseroan

Terbatas No. 40 Tahun 2007. Undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang/berkaitan dengan sumber daya alam melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menurut Kotler dan Nancy (2005) *Corporate Social Responsibility (CSR)* didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan.

Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. Menurut konsep CSR sebuah perusahaan dalam melaksanakan aktivitas dan pengambilan keputusannya tidak hanya berdasarkan faktor keuangan semata melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun masa yang akan datang.

Selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat. Perusahaan perlu memperhatikan lingkungan seperti kejadian bencana longsor yang terjadi di Ciamis. Agar anggapan masyarakat terhadap perusahaan tetap baik sebaiknya perusahaan ikut berpartisipasi membantu masyarakat yang terkena imbas dari longsor tersebut. Dengan demikian citra perusahaan di mata masyarakat dan investor menjadi lebih baik. Sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Environment adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (green), (Ignatius Bondan Suratno, Darsono, Siti Mutmainah, 2006). Eksistensi perusahaan ditengah lingkungan dan masyarakat berdampak dalam dua kondisi, yaitu positif dan negatif. Dampak positif, antara lain keberadaan perusahaan ditengah lingkungan dan masyarakat seperti: menciptakan lapangan

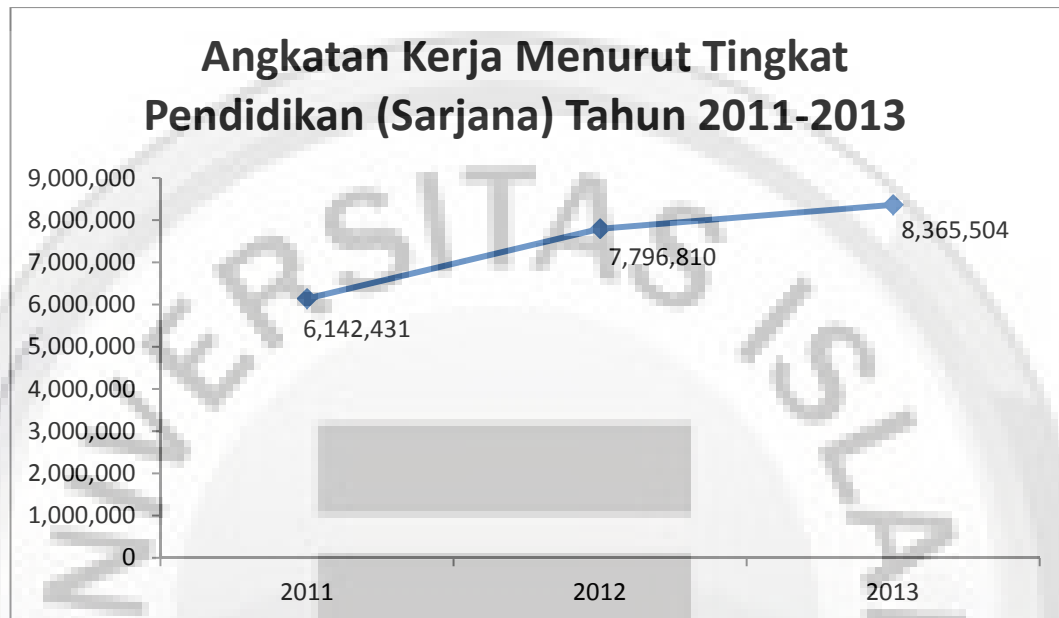
kerja, menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat untuk dikonsumsi, meningkatkan pendapatan, menyumbang pendapatan daerah dan negara, serta mendukung peningkatan ekonomi, dan lain-lain. Sementara, dampak negatif (*negative externalities*) antara lain keberadaan perusahaan di tengah lingkungan menimbulkan pencemaran baik tanah, air maupun udara, sehingga telah mengancam munculnya polusi udara dan air, kebisingan suara, kemacetan lalu lintas, limbah kimia, hujan asam, radiasi, sampah nuklir, dan masih banyak lagi petaka lain sehingga menyebabkan stres mental dan kerugian fisik dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Semakin ketatnya persaingan antar perusahaan akibat adanya pasar bebas dan globalisasi, pada akhirnya menuntut perusahaan untuk mengubah cara mereka menjalankan bisnisnya. Agar terus bertahan, perusahaan-perusahaan tersebut harus dengan cepat mengubah strateginya dari bisnis yang didasarkan pada tenaga kerja (*labor-based business*) menuju bisnis berdasarkan pengetahuan (*knowledge based business*) (Sawarjuwono dan Kadir, 2003), sehingga karakteristik utama perusahaannya menjadi perusahaan berbasis ilmu pengetahuan.

Perkembangan ilmu pengetahuan semakin berkembang pesat, seiring dengan terus berkembangnya ilmu pengetahuan maka tingkat pendidikan yang dibutuhkan perusahaan juga semakin tinggi, hal ini dapat di lihat dari presentase kelulusan sarjana di Indonesia semakin banyak.

Gambar 1.1

Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan



Sumber: Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Dari data grafik diatas menjelaskan bahwa jumlah angkatan kerja menurut tingkat pendidikan sarjana tahun 2011 mencapai 6,142,431 jiwa, lalu pada tahun 2012 mencapai 7,796,810 jiwa, dan pada tahun 2013 mencapai 8,365,504 jiwa. Ini artinya bahwa tingkat kelulusan sarjana mengalami peningkatan dari tiga tahun terakhir dengan rata-rata kelulusan 1,111,536 jiwa per tahun.

Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi diharapkan para pengelola dapat mengimbangi perkembangan ilmu tersebut guna memajukan seluruh kegiatan yang ada pada perusahaan dan dapat meningkatkan pelayanan terhadap nasabah. Perkembangan ekonomi baru dikendalikan oleh informasi dan pengetahuan, hal ini membawa sebuah peningkatan perhatian *Intellectual Capital*

sebagai alat untuk menentukan nilai perusahaan (Stewart, 1997; Hong, 2007), sehingga *Intellectual Capital* pada sebuah perusahaan menjadi sebuah hal yang patut dikembangkan.

Intellectual Capital merupakan kepemilikan pengetahuan dan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan profesional, hubungan yang baik, kapasitas teknologi yang diaplikasikan serta akan memberikan keunggulan kompetitif pada perusahaan (CIMA, 2001). Sebagai sebuah konsep, *intellectual capital* merujuk pada modal-modal non fisik atau yang tidak berwujud (*intangible assets*) (Rupidara, 2008). *Intellectual capital* terkait dengan pengetahuan, pengalaman manusia serta teknologi yang digunakan sehingga memiliki potensi untuk memajukan organisasi dan masyarakat.

Menurut Abidin (2000), *Intellectual Capital* masih belum dikenal secara luas di Indonesia. Hingga saat ini, perusahaan-perusahaan di Indonesia cenderung menggunakan dasar konvensional dalam berbisnis sehingga produk yang dihasilkannya masih miskin kandungan teknologi, banyak sekali aktivitas perusahaan yang didasarkan pengetahuan, keahlian, maupun teknologi, misalnya pengeluaran untuk informasi dan pelatihan. Teknologi masih dicatat sebagai biaya bukan sebagai investasi yang akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan di masa mendatang. Di samping itu, perusahaan-perusahaan tersebut belum memberikan perhatian lebih terhadap *human capital*, *structural capital*, dan *relational capital*, yang merupakan elemen pembangun *Intellectual Capital* perusahaan.

BPR harus memperhatikan *Corporate Social Responsibility*, *Environment*, dan *Intellectual Capital* agar menghasilkan kinerja keuangan yang baik sehingga dapat memaksimalkan profit. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan merupakan faktor penting untuk menilai keseluruhan kinerja perusahaan itu sendiri. Salah satu pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan cara penghitungan *Return on Assets* (ROA). Menurut Horne dan Wachowicz (2005:235) ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia, daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan. Horne dan Wachowicz menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva.

Tabel 1.1

Tabel Jurnal

No	Judul	Penulis	Kesimpulan
1	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Kinerja Keuangan perusahaan Perbankan	Melisa Syahnaz (2012)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dirpoksikan dengan <i>Return On Assets</i> (ROA) dan <i>Return On Equity</i> (ROE).
2.	<i>Social Performance Indicators Initiative (SPI) Final Report</i>	Zeller, Lapenu and Greeley (2003)	The need for tools assessing the social performances of micro finance institutions is more and more widely recognised within the micro finance sector, which is only assessed so far through financial performances.
3	Measuring The Environmental Performance of Microfinance	Marion Allet (2011)	Building on the literature on corporate environmental performance and on

			microfinance social performance, we opted for a cost-effective and practical approach: assessing environmental performance through management indicators.
4.	Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) Perbankan	Damar Asih Dwi Rachmawati (Jurnal Nominal / Volume I Nomor I / Tahun 2012)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara <i>Intellectual Capital</i> terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA).

Berdasarkan latar belakang dan tabel jurnal tersebut, penulis tertarik memilih judul dalam penelitian ini adalah :

“Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Environment*, dan *Intellectual Capital* Terhadap *Financial Performance* Pada BPR di Daerah Banjar, Ciamis, dan Pangandaran Tahun 2013”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada BPR di daerah Banjar, Ciamis, Pangandaran tahun 2013?
2. Bagaimana pelaksanaan *Environment* pada BPR di daerah Banjar, Ciamis, Pangandaran tahun 2013?
3. Bagaimana pelaksanaan *Intellectual Capital* pada BPR di daerah Banjar, Ciamis, Pangandaran tahun 2013?

4. Bagaimana tingkat *Return on Assets* pada BPR di daerah Banjar, Ciamis, Pangandaran tahun 2013?
5. Seberapa besar pengaruh *Corporate Social Responsibility, Environment, dan Intellectual Capital* terhadap *Return on Assets* pada BPR di daerah Banjar, Ciamis, Pangandaran tahun 2013 secara parsial dan simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pemikiran yang telah diutarakan, maka penulis tertarik membuat tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada BPR di daerah Banjar, Ciamis, Pangandaran tahun 2013.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Environment* pada BPR di daerah Banjar, Ciamis, Pangandaran tahun 2013.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Intellectual Capital* pada BPR di daerah Banjar, Ciamis, Pangandaran tahun 2013.
4. Untuk mengetahui bagaimana tingkat *Return on Assets* pada BPR di daerah Banjar, Ciamis, Pangandaran tahun 2013.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Corporate Social Responsibility, Environment, dan Intellectual Capital* terhadap *Return on Assets* pada BPR di daerah Banjar, Ciamis, Pangandaran tahun 2013 secara parsial dan simultan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan praktis dan pengetahuan langsung dengan terjun langsung mempraktekkan pengetahuan teoritis yang telah diperoleh selama kuliah pada kondisi dunia perbankan yang sesungguhnya. Terutama yang berhubungan dengan masalah manajemen keuangan.

2. Bagi Akademis

Mengembangkan pengetahuan mengenai perbankan khususnya *Corporate Social Responsibility, Environment, Intellectual Capital* dan *Return on Assets*.

3. Bagi Perusahaan

Memberikan kontribusi pemikiran tentang pentingnya pertanggungjawaban sosial perusahaan yang diungkapkan di dalam laporan perusahaan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepedulian pada lingkungan sosial.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.5.1 Kerangka Pemikiran

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan. Investor lebih

berminat pada perusahaan yang memiliki citra yang baik di masyarakat karena semakin baiknya citra perusahaan, maka semakin tinggi juga loyalitas konsumen.

Corporate Social Responsibility (CSR) dapat diartikan sebagai prinsip yang menerangkan bahwa perusahaan harus dapat bertanggungjawab terhadap efek yang berasal dari setiap tindakan didalam masyarakat maupun lingkungannya (Fraderick, 1994). Menurut Cheng dan Yulius (2011), aktivitas CSR dapat memberikan banyak manfaat, seperti: dapat meningkatkan citra dan daya tarik perusahaan di mata investor serta analisis keuangan penjualan, dapat menunjukkan brand positioning, dan dapat meningkatkan penjualan dan market share.

Indikator CSR di sebuah perusahaan berbeda dengan CSR yang berlaku di *microfinance*, dalam *microfinance* di terapkan beberapa dimensi yang menjadi dasar penentuan diantaranya jangkauan kepada orang miskin dan minoritas, jangkauan pelayanan, peningkatan partisipasi sosial dan politik modal klien (*improvement social and political capital of clients*), dan tanggung jawab perusahaan (*institution responsibility*). Dalam melakukan penjangkauan target yang biasanya ditujukan kepada orang miskin ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan oleh *microfinance*, misalnya BPR dapat di akses oleh seluruh kalangan, pinjaman kepada klien yang tinggal di desa, pinjaman kepada pekerja informal, dan pinjaman kepada klien yang hanya memiliki jaminan sosial. Kemudian dalam aspek jangkauan pelayanan, *microfinance* harus memperhatikan pinjaman dengan berbagai jangka waktu, pinjaman bagi kebutuhan darurat, tabungan sukarela, produk asuransi, pinjaman dengan pembayaran yang fleksibel, dekat dengan tempat tinggal nasabah, pinjaman dengan prosedur yang cepat dan

melakukan survey tentang kepuasan klien. *Microfinance* juga harus memperhatikan beberapa aspek dalam peningkatan partisipasi sosial dan politik modal klien yaitu laporan pinjaman yang jelas kepada pemimpin, laporan tertulis setiap transaksi pinjaman, laporan tertulis setiap transaksi tabungan, akses nasabah kepada laporan tahunan BPR, kegiatan yang dapat memperkuat ikatan sosial dan pelatihan untuk meningkatkan kepemimpinan kliennya. Dan yang terakhir *microfinance* juga perlu memperhatikan tanggung jawab perusahaan dengan melakukan studi sosial ekonomi untuk menilai kondisi klien, anggaran tahunan untuk pelatihan karyawan, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, akses nasabah kepada laporan tahunan BPR, jaminan kesehatan bagi karyawan, asuransi yang membebaskan membayar hutang apabila terjadi kasus kematian, penjadwalan utang bila terjadi bencana alam dll, menghormati budaya lokal yang berlaku dan memiliki pekerja yang dapat berbicara dengan bahasa setempat.

Selain melaksanakan CSR untuk menjaga kepercayaan nasabah, investor dan masyarakat, BPR harus menjaga *Environment*. Menurut Basuki dan Susilowati (2005), *Environment* adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung seseorang atau sekelompok orang di dalam melaksanakan aktifitasnya. Perubahan iklim, penipisan sumber daya alam, dan masalah polusi telah menempatkan isu-isu lingkungan yang tinggi pada agenda global. Baru-baru ini, isu-isu ini juga telah dibesarkan di sektor keuangan mikro. Promotor 'keuangan mikro hijau' menekankan bahwa keuangan mikro, seperti bisnis lain atau *stakeholder*, memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan. (Green Micro finance,2007; Rippey, 2009;

Van Elteren, 2007). *Environment* dibagi menjadi 5 dimensi untuk mempermudah pengerjaan pada perusahaan, yaitu kebijakan lingkungan (*Environmental Policy*), jejak ekologis (*Ecological Footprint*), resiko lingkungan (*Environment Risks Assessment*), kredit mikro hijau (*Green Microcredit*) dan lingkungan, pelayanan non keuangan (*Environment, Non Financial Services*).

Selain memperhatikan kedua aspek di atas BPR juga harus memperhatikan kemampuan karyawan dari segi pengetahuan. Karyawan yang memiliki kemampuan baik merupakan *asset intangible* yang akan menghasilkan kinerja maksimal bagi perusahaan. Maka dari itu perusahaan perlu menerapkan *Intellectual Capital* demi mendapatkan hasil yang optimal.

Menurut Sveiby (1998) *Intellectual Capital* adalah *the invisible intangible part of the balance sheet can be classified as a family of three, individual competence, internal structural, and external structure*. Sedangkan menurut Willams (2001) mendefinisikan *Intellectual Capital* sebagai proses penciptaan nilai melalui pengetahuan dan informasi yang diaplikasikan pada pekerjaan.

Intellectual Capital yang terbagi dalam tiga dimensi, yaitu: *human, structural, dan relational* merupakan sebuah konsesus umum dalam kemanfaatannya (Cuganesanet al., 2007).

1. Human Capital

Dari dimensi pertama terdapat empat belas indikator yaitu karyawan ahli dalam pekerjaan dan fungsi masing-masing, karyawan sebagai sumber dari ide-ide baru perusahaan, karyawan memiliki kompetensi yang memumpuni,

karyawan yang memiliki tingkat kompetensi yang tinggi, tidak melaksanakan program pelatihan untuk penggantian karyawan, ketika salah satu karyawan keluar dari BPR, spesifikasi pekerjaan bagi karyawannya, karyawan dapat bekerja dibawah tekanan, karyawan dapat memotivasi diri sendiri, karyawan dengan keahlian dasar untuk melayani nasabah, melibatkan karyawan dalam mencetuskan ide-ide baru, karyawan yang memiliki komitmen penuh terhadap pekerjaannya, karyawan yang lebih kreatif, karyawan memiliki kompetensi sosial, dan karyawan selalu mencari pengetahuan terbaru.

2. *Structural Capital*

Dari dimensi kedua terdapat dua belas indikator yaitu karyawan dapat mempersingkat waktu transaksi, transparan kepada nasabah, memunculkan ide-ide bisnis baru, waktu transaksi yang cepat, karyawan yang saling memuji satu sama lain, karyawan yang tidak berorientasi kepada hasil kerja, system yang dapat mengakses informasi yang relevan, sistem informasi BPR yang stabil, karyawan yang bekerja dalam bentuk tim, pembagian struktur organisasi yang baik, budaya bekerja dalam bentuk tim, dan tujuan yang jelas dalam membimbing karyawannya.

3. *Relational Capital*

Dari dimensi ketiga terdapat sepuluh indikator yaitu keterbukaan kepada setiap nasabah, system jaringan yang baik dengan nasabah, pelayanan terdekat kepada setiap nasabahnya, hubungan dengan nasabahnya yang membuat BPR sebaik sekarang, memperoleh ide bisnis baru dari nasabah, dapat memastikan setiap nasabahnya tetap terhubung dengan BPR, melibatkan nasabah dalam

menentukan hal-hal yang menyangkut kepentingan nasabah, karyawan yang memiliki hubungan baik dengan nasabah, dan nasabah membantu BPR dalam memperoleh nasabah baru.

Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Tujuan perusahaan akan sulit tercapai bila perusahaan tersebut tidak bekerja secara efisien, sehingga perusahaan tidak mampu baik langsung maupun tidak langsung bersaing dengan perusahaan sejenis. (Endut Wiyoto dalam Elanvita, 2008). *Return on Assets* (ROA) salah satu rasio untuk mengukur profitabilitas perusahaan, yaitu merupakan perbandingan antara laba bersih sebelum pajak dengan total asset. Menurut Syahyunan (2004:85), *Return on Assets* menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari asset yang di pergunakan.

Return on Assets (ROA) mengukur berapa persentase laba bersih sesudah pajak terhadap total asset perusahaan tersebut.

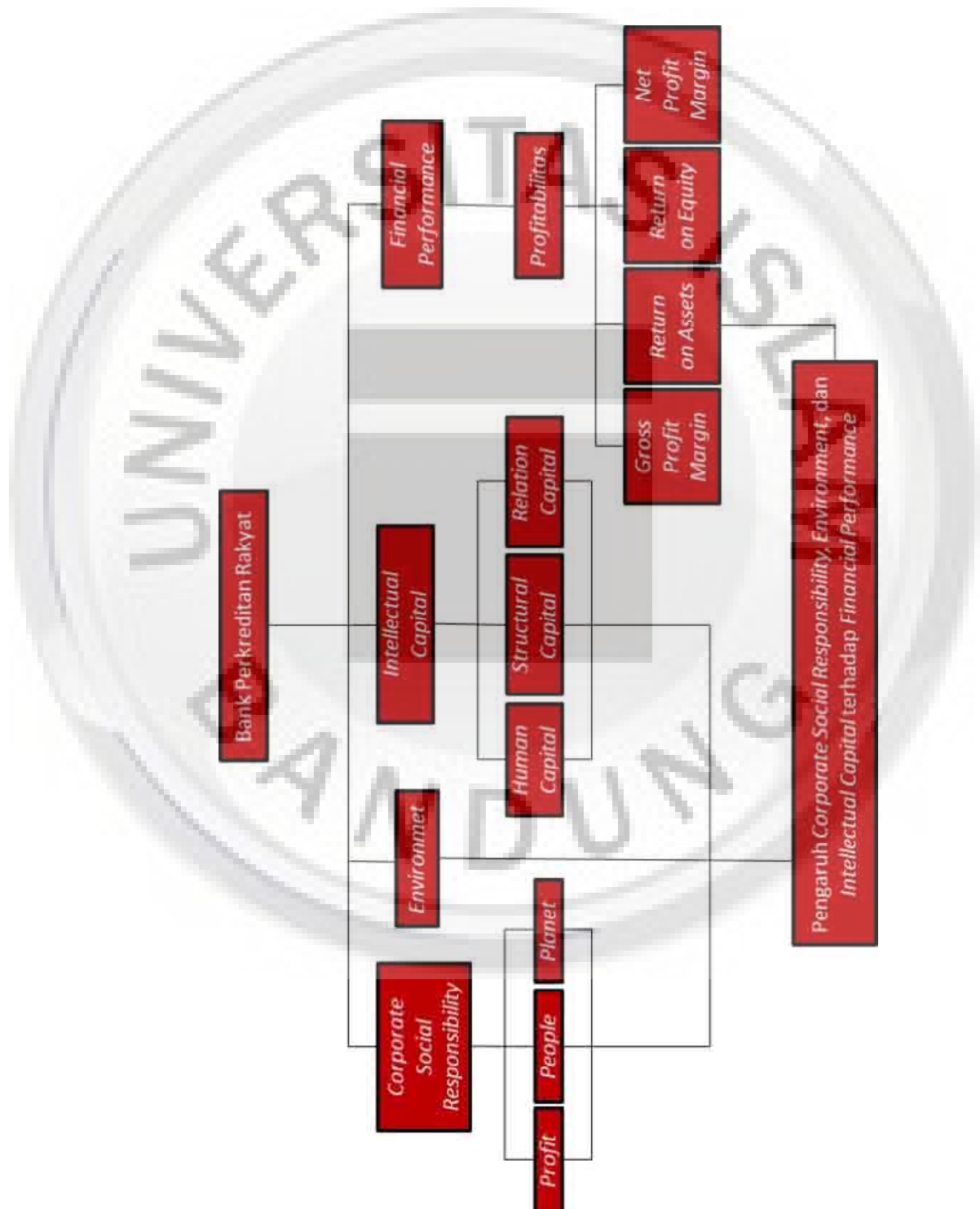
Rumus *Return on Assets* (ROA) :

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih sebelum pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100$$

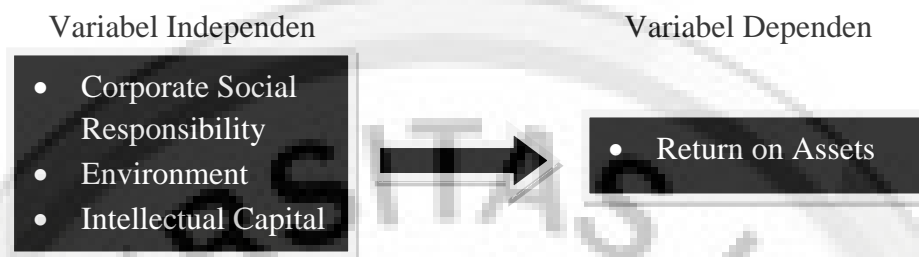
Return on Assets (ROA) merefleksikan keuntungan bisnis dan efisiensi perusahaan dalam pemanfaatan total asset (Chen et al, 2005). Rasio ini mewakili rasio profitabilitas, yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, semakin efisien perusahaan dalam menggunakan assetnya, baik aset fisik maupun aset non-fisik akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.

Gambar 1.2

Kerangka Pemikiran



Atas dasar uraian diatas maka pengaruh dari masing-masing variabel tersebut terhadap *Return on Assets* maka dapat digambarkan dalam model paradigma seperti ditunjukkan dalam Gambar 1.2



Gambar 1.3 Paradigma Kerangka Pemikiran

1.5.2 Hipotesis

Dalam hal ini penulis akan menyusun suatu hipotesis berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Terdapat pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Environment*, dan *Intellectual Capital* terhadap *Return on Assets*.”